

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar belakang**

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ketertiban sosial, sebagaimana tujuan di atas tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tentang pemerintahan daerah pada pasal 18 ayat 1 dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang dasar tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang telah di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 thun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 2 ayat 1 di jelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan daerah Kabupaten/Kota di bagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Dalam pasal 221 ayat 1 pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Selanjutnya pasal 224 ayat 1 menyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/waliKota melalui sekretaris Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat selain menerima kewenangan yang bersifat atributif juga memiliki kewenangan yang bersifat delegatif. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Camat mnyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan dan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat dan menjadi ruang lingkup tugasnya;

8. Dan/atau yang dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan kelurahan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan kepada daerah Kabupaten Kota. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kesehariannya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian Kabupaten/Kota secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung aspirasi masyarakat baik berupa keluhan, keritikan serta sumbang fikiran dari masyarakat,

Kecamatan pangkalan kuras yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten pelalawan saat ini memiliki luas wilayah 847,37 KM dengan kepadatan penduduk 55.556 jiwa sehingga menempatkan Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terbanyak kedua setelah Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan ibukota Kabupaten Pelalawan. Profil Kabupaten Pelalawan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.1 Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2016**

NO	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah(Ha)	Jumlah Penduduk(jiwa)
1	2	3	4	5	6
2	Pangkalan Kerinci	3	4	19.355,53	102.926
3	Langgam	1	16	144.245,09	28.368
4	Bandar sei kijang	1	4	31.941.20	28.725
5	Ukui	1	11	129.056,06	37.715

1	2	3	4	5	6
6	Pangkalan Lesung	1	9	50.485,06	30.158
7	Bunut	1	9	40.802,77	14.493
8	Pelalawan	1	8	149811.31	18.563
9	BandarPetalangan	1	10	37.255,16	13.902
10	Kuala Kampar	1	9	150.265,19	17.948
11	Kerumutan	1	9	96.003,66	22.484
12	Teluk Meranti	1	8	432.984.41	16.276
Jumlah		14	104	1.392.494,29	387.114

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kuras, 2017

Camat bertugas membuat dan melaksanakan rencana operasional di kecamatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada kasi pemerintahan, kasi ketentraman dan ketertiban umum, kasi perekonomian, kasi pembangunan, dan kasi kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati/ Walikota kepada Camat, serta menandatangani laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas di Kecamatan. Untuk itu sebagai abdi Negara, dan abdi masyarakat harus menyadari betul fungsi dan kedudukan sebagai penggerak dan pelaksanaan dalam kegiatan pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan, keberhasilan itu juga di pengaruhi pula oleh faktor kedisiplinan, karena disiplin mendorong pegawai untuk bertanggung jawab kepada tugasnya di Kecamatan.

Selanjutnya pada pasal 15 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitas;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan dan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pembinaan pegawai dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan kepada pegawai, pemberian motivasi kepada pegawai untuk mengembangkan karier dan tersedianya perlengkapan peralatan kantor. Apabila pembinaan kepada pegawai dapat dilakukan secara baik maka suasana kerja yang kondusif sehingga dapat tercipta produktifitas kerja secara baik.

Di kecamatan pembinaan pegawai di lakukan oleh camat yang merupakan tugas delegatif yang merupakan pelimpahan wewenang oleh bupati/Walikota yang di atur dalam Undang-undang Perbup no 22, pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap PNS sesuai peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut;

1. Koordinasi pemerintahan antara susunan pemerintahan;
2. Pemberian pedoman dan standard pelaksanaan urusan pemerintahan;

3. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan

Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan pegawai pada kantor camat pangkalan kurus, dapat dilihat sebagai berikut

**Tabel I.2. Daftat Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Camat Pangkalan Kurus Tahun 2016**

No	Nama	Pendidikan	PANGKAT		Jabatan	Jenis Kelamin
			Gol/ruang	TMT		
	2	3	4	5	6	7
1	FIRDAUSWAHIDIN,SP.Msi NIP.197701292005021003	PASCA SARJANA	IV/a	22-02-2017	CAMAT PANGKALAN KURUS	L
2	SYOFYAN NIP.196712311987031011	SARJANA	IV/a	01-04-2016	SEKCAM PANGKALAN KURUS	P
3	HARMUNAS NIP.195903131987091002	SLTA	III/d	10-01-2010	KASI PEMERINTAHAN	L
4	ASRIL.SH NIP.196503161986031007	SARJANA	III/d	01-10-2011	KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	L
5	NISKAUSAR.S.PD NIP.197006041993101001	SARJANA	III/d	01-10-2015	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	L
6	RUSMAINAR.SP NIP.196805162002122002	SARJANA	III/d	01-10-2015	KASI PELAYANAN UMUM	P
7	SYOFYAN NIP.196712311987031011	SLTA	III/d	01-10-2015	LURAH SOREK SATU	L
8	ERLINDA NIP.196305041986032002	SLTA	III/c	01-04-2014	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	P
9	MATIUS FUZANDI NIP. 196703281996031003	DIII	III/c	01-04-2014	PLH KASI KESOS	L
10	ASMUNIARTY.A.Mk NIP. 96112231983012001	SARJANA	III/c	01-04-2015	KASUBBAG KEUANGAN	P
11	JURHAN.AMK NIP.197909022002121002	SARJANA MUDA	III/c	01-04-2016	SEKRETARIS LURAH	L
12	LIDYA YULIANA.AMK NIP.198007142003122006	SARJANA MUDA	III/c	01-10-2016	KASI PELAYANAN UMUM KELURAHAN	P

1	2	3	4	5	6	7
13	HERMAN SIMON.SE NIP.196607061991031016	SARJANA	III/c	10-042013	KASI PEMERINTAHAN KE	L
14	ZAMZAMI.SE NIP.196008191981011002	SARJANA	III/b	01-04-2014	KASUBBAG PROGRAM	L
15	RITA MARIANA.SE NIP.198303272008012009	SARJANA	III/b	01-042014	KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KELURAHAN	P
16	EVA KASMIDAR NIP.197804202008012022	SARJANA	III/a	01-04-2016	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN	P
17	MUHAMMAD TOHA.SE NIP.198605122015031004	SARJANA	III/a	01-04-2015	STAF KASUBBAG PROGRAM	L
18	YUSMAR NIP.196708101988041001	SMA	II/c	01-04-2013	PENGURUS BARANG	L
19	MOCH DHEDIK IMAWAN NIP.198511142006041001	SLTA	II/c	01-10-2015	PENGURUS BARANG	L
20	ASRIL NIP.1975113022007011007	SLTA	II/c	01-04-2016	STAF KELURAHAN	P
21	NURZAMI.KH NIP.196008519840032002	SMP	II/b	01-04-2000	PEMBANTU BENDAHARA	P
22	AZIMON NIP.198211112007012001	SLTA	II/b	01-10-2011	PEMLUAT DAFTAR GAJI	L
23	ELIS FARIAN NIP.198106122008011017	SLTA	II/b	01-04-2013	BENDAHARA PENGELUARAN	L
24	TOTOK SUWITO NIP.196712252009061002	SLTA	II/b	01-10-2014	SEKRETARIS DESA	L
25	ACHMAD SAGI NIP.196706262009061002	SLTA	II/b	01-10-2014	SEKRETARIS DESA	L
26	SUKUR NIP.196710122010011001	SLTA	II/b	01-10-2015	SEKRETARIS DESA	L
27	IMAM SANTOSO NIP.196604222009061001	SLTA	II/b	01-04-2015	SEKRETARIS DESA	L
28	AGUS SALIM NIP.197108272010011004	SLTA	II/a	01-10-2011	SEKRETARIS DESA	L

Sumber: kantor camat pangkalan kurus,2017

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa jumlah pegawai pada kantor camat pangkalan kurus memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, rendahnya pendidikan pegawai membuat berkurangnya kecepatan berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugasnya, kinerja seseorang atau satuan kerja organisasi dalam mencapai tujuan.

Pegawai kantor Camat termasuk dalam PNS Daerah, oleh karena itu pemerintah daerah lebih meningkatkan pembinaan pegawai untuk melancarkan pembangunan dan meningkatkan kerja dari pegawai itu sendiri. Menurut sastroputro, (1988;291) mengatakan bahwa pembinaan untuk tercapainya hasil kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Adanya bimbingan dari atasan;
2. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan;
3. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karir, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan pelatihan;
4. Memberikan penghargaan.

Untuk meningkatkan dan mewujudkan efektifitas dan efisiensi kerja sangat penting dilaksanakan pembinaan pegawai untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari fenomena- fenomena yang ditemukan sebagai berikut :

1. Masih ada 13 orang pegawai Pegawai kantor Camat Pangkalan Kuras yang tidak mengikuti pelatihan selama tahun 2013-2015 dapat terlihat sebagai berikut:

**Tabel I.3 : Jumlah Pegawai Kantor Camat Pangkalan Kuras yang Pernah Mengikuti Pelatihan Selama Tahun 2013-2015**

No	Nama Pegawai	Jenis pendidikan	Golongan	Jumlah
1	Syofyan	DIKLAT PIM TK	IV	1
2	Herman Simon.SE	DIKLAT PIM TK	IV	1
<b>Jumlah</b>				2

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kuras, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat jumlah pegawai Kantor Camat Pangkalan Kuras yang sudah pernah dikirim mengikuti pelatihan yaitu hanya 2 orang pegawai pada tahun 2013-2015. Dari penjelasan diatas mengindikasikan masih terdapatnya sebagian dari pegawai yang tidak pernah dikirim mengikuti pelatihan sehingga mempengaruhi pengetahuan dan hasil kinerja dari pegawai itu sendiri.

Kegiatan pelatihan dan bimbingan sangat di butuhkan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan yang diharapkan dan sudah pasti akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam melayani masyarakat dan pencapaian tujuan Organisasi

2. Terdapat frekuensi pegawai dilihat dari pengembangan karier yaitu melanjutkan pendidikan atas inisiatif sendiri dapat kita lihat seperti yang di jelaskan pada tabel dibawah ini

**Tabel I.4: Jumlah Pegawai Kantor Camat Pangkalan Kuras yang Melanjutkan Pendidikan Atas Inisiatif Sendiri Pada Tahun 2011**

No	Nama Pegawai	Melanjutkan pendidikan Atas inisiatif Sendiri	Melanjutkan Pendidikan Atas Inisiatif Camat	Tahun	Jumlah
1	Hermon simon.SE	1	-	2011	1
2	Zamzami.SE	1	-	2011	1
3	Syofyan	1	-	2011	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>			<b>3</b>

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kuras,2016

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat pada 2011 hanya 3 orang dari sebagian pegawai yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi awalnya

berpendidikan SMA keperguruan tinggi dengan tingkat pendidikan Strata satu atas inisiatif sendiri, dan masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA. Dalam meningkatkan kinerja seharusnya Camat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan dengan cara Camat mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten agar pegawai yang berpendidikan rendah bisa melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan bidang kerjanya, dengan adanya pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **’Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Pegawai Pada Kantor Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan’**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari berbagai fenomena seperti yang di uraikan di atas dapat di ketahui pembinaan pegawai kantor camat telah selesai, tapi bila dicermati seksama maka terlihat indikasi pembinaan pegawai kantor camat belum berjalan sebagai mana diharapkan. Dari kondisi ini maka penulis merumuskan suatu pemasalahan utama penelitian ini yaitu : **“ Apakah proses pelaksanaan fungsi Camat dalam pembinaan pegawai kantor Camat Kecamatan Pangkalan Kuras Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sudah berjalan sebagai mana mestinya”**.

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan tugas Camat dalam pembinaan pegawai kantor Camat pangkalan kurus Kabupaten pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menciptakan pembinaan pegawai yang diterapkan oleh Camat pada kantor Camat pangkalan kurus Kabupaten pelalawan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini meliputi sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu wadah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan;
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan kepada pihak pemerintahan terutama kepada Camat pangkalan kurus Kabupaten pelalawan untuk menciptakan kedisiplinan pegawai;
- c. Secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dalam persoalan yang sama dimasa yang akan datang